BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah hubungan antara dua atau lebih mencakup berbagai macam hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok maupun secara perorangan dari suatu bangsa atau negara, yang melakukan interaksi baik secara resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara lain (Rudy, 2003: 3).

Hubungan Internasional dipandang sebagai keseluruhan segi internasional dari kehidupan sosial, dalam arti semua perilaku manusia yang terjadi berasal dari suatu negara dapat memberi pengaruh terhadap perilaku manusia di negara lain. Hubungan Internasional merupakan hubungan antar negara atau antar individu dari negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan politis, budaya, ekonomi, ataupun pertahanan dan keamanan (hankam) atau dengan kata lain dapat diartikan hubungan antar negara yang berbeda-beda dalam segala aspek.

Suatu hubungan internasional ini dapat terjadi, pastinya terdapat faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di setiap negara, hal inilah yang dapat mendorong kerjasama antar negara yang nantinya kerjasama tersebut tunduk terhadap hukum sesuai dengan hukum yang dianut negaranya masing-masing. Pentingnya

hubungan internasional bagi suatu bangsa berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dalam menjalin hubungan internasional tersebut. Robert Jackson dan George & Sorensen juga mengatakan, bahwa:

> "Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdepedensi perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) intenasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya" (Jackson & Sorensen, 2009 : 34).

Dalam mempelajari ilmu hubungan internasional terdapat tujuan dasar seperti yang disampaikan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochammad Yani adalah sebagai berikut :

> "Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku antara aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang konflik serta interaksi di dalam organisasi internasional" (Perwita & Yani, 2005: 4-5).

Adapun beberapa konsep umum yang terdapat di dalam hubungan internasional adalah sebagai berikut :

1. Peranan merupakan aspek dinamis. Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.
2. Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dalam cara yang dikehendaki pelaku tersebut.

3. Kerjasama dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan Kerjasama Internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.
4. Analisis sistem dalam Hubungan Internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita & Yani, 2005: 29-34).

2.1.2 Hubungan Bilateral

Terselenggaranya hubungan bilateral juga tidak terlepas dari tercapainya beberapa kesepahaman antara dua negara yang melakukan hubungan yang mana mereka mengabdi pada kepentingan nasionalnya dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing. Tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu negara. Hubungan bilateral dapat dikatakan sebagai hubungan yang dijalankan oleh dua negara yang berdaulat. Seperti yang diungkapkan oleh T. May Rudy bahwa Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002 : 127).

Pada berbagai bentuk hubungan bilateral terdapat situasi ketika keberadaan dan fungsi kedutaan besar tidak dapat dipertahankan. Keputusan formal untuk menutup kedutaan besar terjadi terjadi ketika timbul masalah dengan satu atau

lebih negara (Djelantik, 2008:85-87). Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama politik, budaya dan ekonomi di antara dua negara. Kebanyakan kerjasama internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan hubungan bilateral adalah kerjasama multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri *(freewill).*

> "Dalam diplomasi bilateral, konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002:15-16).

Karena dalam penelitian ini meneliti mengenai dua negara yang berinteraksi, maka peneliti akan membahas mengenai perjanjian bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002:127). Perjanjian Bilateral akan muncul bila dua negara saling sepakat akan adanya kepentingan yang sama. Jika bentuk perjanjian berupa kerjasama dan lingkupnya hanya terbatas pada dua negara saja maka kerjasama itu memiliki kecenderungan untuk bertahan lama, perlu diketahui, kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa kerjasama hanya akan terjadi, karena adanya saling ketergantungan antar negara-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing.

Hubungan bilateral atau bilateralisme, mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara. Kebanyakan diplomasi yang terjadi saat ini berbentuk hubungan bilateral. Alternatif diplomasi lainnya adalah multilateral

yang melibatkan banyak negara dan unilateral, jika satu negara bertindak sendiri. Seringkali terjadi perdebatan mengenai bagaimana efektivitas dari penerapan diplomasi bilateral dan multilateral. Hubungan bilateral yang dimaksud adalah kerjasama di bidang ideologi, politik, ekonomi, hukum, keamanan. Namun dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah hubungan bilateral yang difokuskan pada kerjasama Indonesia-Australia dalam bidang pemberdayaan perempuan.

2.1.3 Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional, yang meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara.

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita dan Yani, 2005:33). Bentuk kerjasama internasional secara bilateral lebih sering dilakukan seperti pertukaran duta besar, kunjugan kenegaraan dan penandatanganan atau perjanjian. Kerjasama Bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002:127).

Oleh karena itu, dalam menentukan terjalinnya kerjasama dengan negara lain maka diperlukan langkah yang tepat dalam mengambil keputusan, mengingat dalam setiap kerjasama bilateral mengandung kepentingan-kepentingan strategis

dan sasaran utama dari negara-negara yang terlibat di dalamnya dalam pelaksanaan politik luar negerinya.

Joseph Grieco menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Cooperation among Nation Europe, America, and Nontariff Barries to Trade* bahwa kerjasama internasional hanya berlangsung jika terdapat kepentingan objektif dan oleh karenanya kerjasama dan berakhir jika kepentingan obyektif ini berubah. Tujuan dari kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara negara tertentu dan untuk menggabungkan kompetensi-kompetensi yang ada sehingga tujuan yang diinginkan bersama dapat tercapai (Sugiono, 2006:6).

2.1.4 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan sebuah dasar pokok dalam menentukan suatu kebijakan serta merupakan kriteria dalam upaya menentukan tindakan dan langkah yang akan diambil oleh suatu pemerintahan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu :

> "Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudi, 2002 : 116).

Kepentingan nasional adalah penggunaan kekuasaan secara bijaksana untuk menjaga berbagai kepentingan yang dianggap paling vital bagi kelestarian

negara. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur kebutuhan yang sangat vital bagi negara yaitu mencakup kepentingan kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi (Pit-Fat,V,2005:217-316).

Karena tidak ada *interest* secara tunggal mendominasi fungsi pembuatan keputusan suatu pemerintah, maka konsepsi ini dapat lebih akurat jika dianggap sebagai "*national interest*". Manakala sebuah negara mendasarkan politik luar negeri sepenuhnya pada kepentingan nasional secara kukuh dengan sedikit atau tidak dihiraukan sama sekali terhadap prinsip-prinsip moral universal, maka negara tersebut dapat diungkapkan sebagai kebijaksanaan realis, berlawanan dengan kebijakan idealisyang memperhatikan prinsip moral internasional.

Kepentingan nasional suatu negara dalam kurun waktu tertentu berbeda dengan kurun waktu lainnya, sehingga mengakibatkan keadaan politik internasional selalu berubah-ubah negara yang satu dengan negara yang lainnya dalam memenuhi kepentingan nasional negara masing-masing.

Akan tetapi bagaimanapun juga perubahan politik internasional, kebijakan luar negeri harus selalu mengabdi kepada kepentingan nasional. Kepentingan nasional antara negara negara berbeda beda tersebut menjadi suatu penentu yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap hubungan luar negerinya dengan negara lain dalam menjalankan pemerintahannya yang ada dengan sebaik-baiknya (https://prezi.com/yizmb-eb_4pl/hubungan-politik-luar-negeri-kepentingan-nasional-dan-tuju/ di akses pada tanggal 20 Juli 2017).

2.1.5 Gender Dalam Hubungan Internasional

Gender adalah konsep budaya yang diberikan seseorang karena ia terlahir dengan jenis kelamin tertentu. Sebagai akibat dari suatu proses kebudayaan, maka ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dengan perempuan dalam peranan sehari-hari, yang kemudian menjadi *stereotype* tertentu di dalam masyarakat. Pada tahun 1920an, konsepsi gender dipahami sebagai suatu perbedaan (*differences*) antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya atribut personal. Pada masa ini konsep gender sangat terkait erat dengan faktor fisik atau biologis.

Dengan pemahaman bahwa gender adalah konsep di dalam kebudayaan masyarakat. Sejak abad 17 hingga abad 21 perjuangan feminisme telah mencapai perluasan wilayah dan dalam perkembangannya selama 20 tahun terakhir ini pertanyaan-pertanyaan mengenai gender menjadi sesuatu yang sangat menarik mengenai hubungan internasional.

Ketidaksetaraan gender akibat perbedaan jenis kelamin menjadi persoalan ketika hal tersebut mengakibatkan ketidakadilan gender. Namun dalam perkembangannya, memahami persoalan ketidakadilan gender tidak lagi cukup hanya dengan konsep gender yang sifatnya dikotomis yaitu hanya melihat perbedaan laki-laki dan perempuan.

> "konsepsi yang cenderung dikotomi ini tidak dapat menangkap kompleksitas gender dalam kehidupan manusia. Konsep gender seharusnya juga mampu mengakomodir fakta akan keberagaman dalam laki-laki maupun perempuan dan tidak secara mudah membuat dikotomi hanya antara dua jenis kelamin itu. Dalam konteks ini Connell menyoroti pluralitas dalam maskulinitas. bahwa karakter maskulin tidaklah tunggal namun beragam dan terdapat hegemonic masculinity sebagai salah satu karakter maskulin yang mendominasi dan menghegemoni struktur dan sistem internasional sehingga memarginalkan karakter lainnya. Jika kembali dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan gender maka Connell

> menegaskan bahwa korban ketidakadilan gender tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki yang memiliki karakter maskulinitas tertentu" (Connel,2005:829-859).

Oleh karena itu sekitar tahun 1960-an Connell dan ilmuwan lain seperti Jill Steans mengusulkan perubahan konsepsi gender dengan tidak lagi berkutat pada isu perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya dikotomis tapi lebih melihat relasi gender (*gender relations*) antar keduanya. Lebih jelasnya, Connell kemudian mendefinisikan gender sebagai "*a matter of the social relations within which individuals and groups act*." Steans juga mengartikan gender sebagai "*ideological and material relations*" yang eksis diantara laki-laki dan perempuan. Kedua definisi ini menunjukkan bahwa konsepsi relasi gender tidak hanya mencerminkan hubungan personal dan sosial tapi juga hubungan kekuasaan dan simbolik. Paling tidak ada tiga faktor yang menyebabkan pemisahaan gender dan HI:

a. aktor tradisional HI didominasi oleh laki-laki seperti pembuat kebijakan nasional dan militer, posisi tentara dan posisi dalam diplomasi,
b. Terjadi pemisahan kedudukan perempuan dilihat dari studi HI yang banyak memfokuskan pada perang, perdagangan, pembentukan rejim dan pengembalian keputusan saat krisis, dan
c. Terjadinya penyamaan identitas negara dengan sifat maskulin seperti sifat kompetitif, rasional, egois, dan mencari kekuasaan (Sucipto, 2013:23).

2.1.6 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mengatasi hambatan guna mencapai pemerataan atau persamaan bagi laki-laki dan perempuan pada

setiap tingkat proses pembangunan. Teknik analisis pemberdayaan atau teknik analisis Longwe sering dipakai untuk peningkatan pemberdayaan perempuan khususnya dalam pembangunan. Kriteria analisis yang digunakan dalam metode ini adalah

(1) tingkat kesejahteraan,

(2) tingkat akses (terhadap sumberdaya dan manfaat),

(3) tingkat penyadaran,

(4) tingkat partisipasi aktif (dalam pengambilan keputusan), dan

(5) tingkat penguasaan (kontrol).

Pemberdayaan perempuan Indonesia tergolong masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Pendekatan pemberdayaan perempuan (*empowerment*) menginginkan perempuan mempunyai kontrol terhadap beberapa sumber daya materi dan non materi yang penting dan pembagian kembali kekuasaan di dalam maupun diantara masyarakat (Moser&Daulay, 2006). Di Indonesia keberadaan perempuan yang jumlahnya lebih besar dari laki – laki membuat pendekatan pemberdayaan dianggap suatu strategi yang melihat perempuan bukan sebagai beban pembangunan melainkan potensi yang harus dimanfaatkan untuk menunjang proses pembangunan bagi perempuan Indonesia.

Bahwa strategi pemberdayaan bukan bermaksud menciptakan perempuan lebih unggul dari laki-laki kendati menyadari pentingnya peningkatan kekuasaan, namun pendekatan ini mengidentifikasikan kekuasaan bukan sebagai dominasi yang satu terhadap yang lain, melainkan lebih condong dalam kapasitas perempuan meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal. Pemberdayaan

perempuan adalah pemenuhan hak mereka untuk menentukan pilihan dalam kehidupan dan mempengaruhi arah perubahan melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol atas sumber daya material dan non material yang penting (Moser&Daulay, 2006).

Mengukur keberhasilan program pembangunan menurut perspektif gender, tidak hanya dilihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat atau penurunan tingkat kemiskinan. Tetapi lebih kepada sejauh mana program mampu memberdayakan perempuan. Dalam mengukur pengaruh sebuah kebijakan, dan atau program pembangunan terhadap masyarakat menurut perspektif gender, Moser mengemukakan dua konsep penting, yakni pemenuhan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis

Pemberdayaan perempuan berdasarkan analisis gender adalah membuat perempuan berdaya dalam memenuhi kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender. Analisis kebutuhan praktis dan strategis berguna untuk menyusun suatu perencanaan ataupun mengevaluasi apakah suatu kegiatan pembangunan telah mempertimbangkan ataupun ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan baik oleh laki-laki maupun perempuan (Moser & Daulay, 2006).

Konsep pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk menjadikan sesuatu yang adil dan beradab menjadi lebih efektif dalam seluruh aspek kehidupan seperti dalam paragraf sebelumnya tertuliskan tentang permasalahan yang dihadapi kaum perempuan sehingga perlu adanya pemberdayaan. Kaum perempuan secara proporsional lebih rentan dan miskin, tapi sering tidak

terjangkau oleh program dan layanan publik. Persoalan kemiskinan yang dihadapi perempuan sejatinya tidak sama dengan laki-laki.

Pemahaman akses (peluang) dan kontrol (penguasaan) disini perlu tegas dibedakan. Akses (peluang) yang dimaksud di sini adalah kesempatan untuk menggunakan sumber daya ataupun hasilnya tanpa memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumberdaya tersebut, sedangkan kontrol (penguasaan) diartikan sebagai kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumberdaya manusia yang ada

Dengan demikian, seseorang yang mempunyai akses terhadap sumberdaya tertentu, belum tentu selalu mempunyai kontrol atas sumberdaya tersebut, dan sebaliknya. Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa sebagaimana *Gender Equitable Development (*GED) masuk dalam meningkatnya pertumbuhan ekonomi perempuan Indonesia dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi (http://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/ diakses pada tanggal 20 Mei 2017)

2.2 Kerangka Pemikiran

Di dalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar lebih terarah. Oleh karena itu di butuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Kerjasama antara Indonesia dan Australia merupakan suatu bentuk interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Kerjasama internasional

dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beragam sehingga beberapa negara membentuk kerjasama internasional.

Kerjasama bilateral adalah suatu kerja sama yang terjalin antara dua negara dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pemdidikan dan kebudayaan. Kerjasama bilateral cenderung lebih mengutamakan pendekatan secara kekerabatan, seperti memberikan bantuan berupa dana untuk fasilitas kegiatan ataupun berupa pinjaman.

Australia dan Indonesia telah bermitra dalam pembangunan lebih dari 60 tahun. Kemitraan ini mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan infrastruktur dasar, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, dan memperkuat demokrasi, keadilan serta tata kelola pemerintahan. Menjaga kemitraan ini sangatlah penting bagi Australia. Luasnya wilayah Indonesia serta kedekatan jaraknya dengan Australia menjadikan peningkatan kesejahteraan, stabilitas dan pertumbuhan di Indonesia amat penting bagi kedua negara sekaligus kawasan (https://www.coursehero.com/file/p2t9ihb/2-Australia-dan-Indonesia-telah-bermitra-dalam-pembangungan-lebih-dari-60-tahun di akses 24 Juli 2017).

Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia dilakukan karena mengingat Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak mengingat kurangnya kemampuan kedua negara dalam menangani permasalahan

negara-negara masing masing. Kemitraan yang baik adalah yang mampu memberi keuntungan atau nilai lebih bagi masing-masing pihak yang bermitra, dengan kata lain yang bisa memberi *win-win solution*. Nilai lebih ini tidak harus berupa materi, namun bisa pula dalam bentuk peningkatan kapasitas layanan (seperti: pendidikan, kesehatan, penyediaan tenaga kerja), bertambahnya akses seperti kerjasama sosial ekonomi pendidikan antara negara yang berkerjasama dan lain sebagainya. Pada dasarnya setiap negara akan menghadapi keterbatasan wilayah, karena setiap negara mempunyai batas-batas geografis yang diakui oleh dunia (https://www.ekon.go.id/berita/view/iabw-tingkatkan-kerjasama.1817.html diakses pada tanggal 20 Juli 2017).

Artinya tata hubungan antar bangsa, tidak dibenarkan satu negara dengan semena-mena menguasai wilayah negara lain. Selanjutnya dikatakan bahwa keterbatasan wilayah menyebabkan setiap negara berusaha menggunakan sumberdaya yang dikuasai secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Setiap negara cenderung memperkuat diri sendiri baik secara ekonomi, politik, militer, budaya lokal (*origin*) karena anggapan bahwa negara lain setiap saat bisa menjadi ancaman.

Salah satu yang menjadi tantangan besar pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan dan menciptakan kesempatan ekonomi untuk masyarakat miskin, maupun melayani mereka yang tertinggal. Kaum perempuan secara proporsional lebih rentan dan miskin, tetapi sering tidak terjangkau oleh program dan layanan publik terhadap tantangan perempuan Indonesia dalam pemberdayaan (http://print.kompas.com/baca/dikbud/pendidikan/2015/10/20/Tantangan-

Kompleks-Pemberdayaan-Perempuan-Indonesia diakses pada tanggal 24 juli 2017).

Melihat kondisi perempuan Indonesia yang kehidupannya dibawah layak standar hidup maka, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Pemerintah Australia yang diwakili oleh *Departement Of Foreign Australia Trade* (DFAT) meluncurkan kerjasama dalam upaya pengentasan kemiskinan, yang dinamakan "Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan" atau MAMPU.

Program yang di luncurkan pada tahun 2012 dan di resmikan oleh perwakilan kedua pemerintahan ini, memusatkan fokus intervensi pada perempuan miskin dan organisasi-organisasi perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan miskin yang ada di Indonesia (http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/empowering-indonesian-women-for-poverty-reduction-mampu-program-design-document.aspx di akses pada tanggal 25 Juli 2017).

Tujuan MAMPU berusaha untuk meningkatkan jangkauan pelayanan publik dan penghidupan bagi perempuan miskin di wilayah-wilayah terpilih di Indonesia. Pada khususnya, telah diidentifikasi lima bidang tematik strategis yang mengarahkan advokasi kebijakan dan intervensi:

1. Meningkatkan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial pemerintah.
2. Meningkatkan akses perempuan pada pekerjaan serta menghilangkan diskriminasi di tempat kerja.

3. Memperbaiki kondisi untuk migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri.
4. Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi.
5. Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan.Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, MAMPU berusaha untuk memperkuat kepemimpinan, pengorganisasian dan perwakilan politik perempuan agar mereka dapat mempengaruhi kebijakan, peraturan dan layanan pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan perempuan miskin. Dalam melakukan hal ini, pelaksanaan program MAMPU berfokus pada dua pendekatan, yaitu:

Pertama, Penguatan Kelembagaan MAMPU mendukung para organisasi perempuan dan organisasi yang tertarik pada isu gender dengan memperkuat fungsi internal, kinerja, dan keberlanjutan mereka sehingga lebih mampu melayani konstituensinya. Organisasi-organisasi mitra terpilih dan jaringannya akan difasilitasi dalam memperluas ruang lingkup kerja dan meningkatkan efektivitas kegiatan (http://www.mampu.or.id/id/node/1 di akses pada tanggal 24 Juli 2017).

Dengan demikian, mereka dapat memperbesar peluang ekonomi dan akses perempuan miskin terhadap program pemerintah serta memberi kontribusi yang lebih tinggi pada reformasi kebijakan, undang-undang maupun sistem layanan publik di tingkat nasional ataupun daerah (http://www.mampu.or.id/id/node/1 di akses pada tanggal 24 Juli 2017).

Kedua, Penguatan Parlemen MAMPU juga memberikan berbagai dukungan bagi kaukus parlemen perempuan, kaukus parlemen dan komisi yang terkait isu MAMPU, agar anggota DPR/ DPRD perempuan maupun laki-laki yang memiliki komitmen dan keberpihakan terhadap isu kemiskinan dan gender agar dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif. Dukungan juga diberikan agar mereka dapat berjejaring dan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan lainnya (seperti sektor swasta, pemerintah, masyarakat sipil, serta lembaga-lembaga mitra MAMPU), sehingga dapat mendorong reformasi kebijakan terkait lima bidang strategis yang diprioritaskan oleh MAMPU. Prinsip dalam pelaksanaan Program MAMPU dilaksanakan berdasarkan berbagai prinsip:

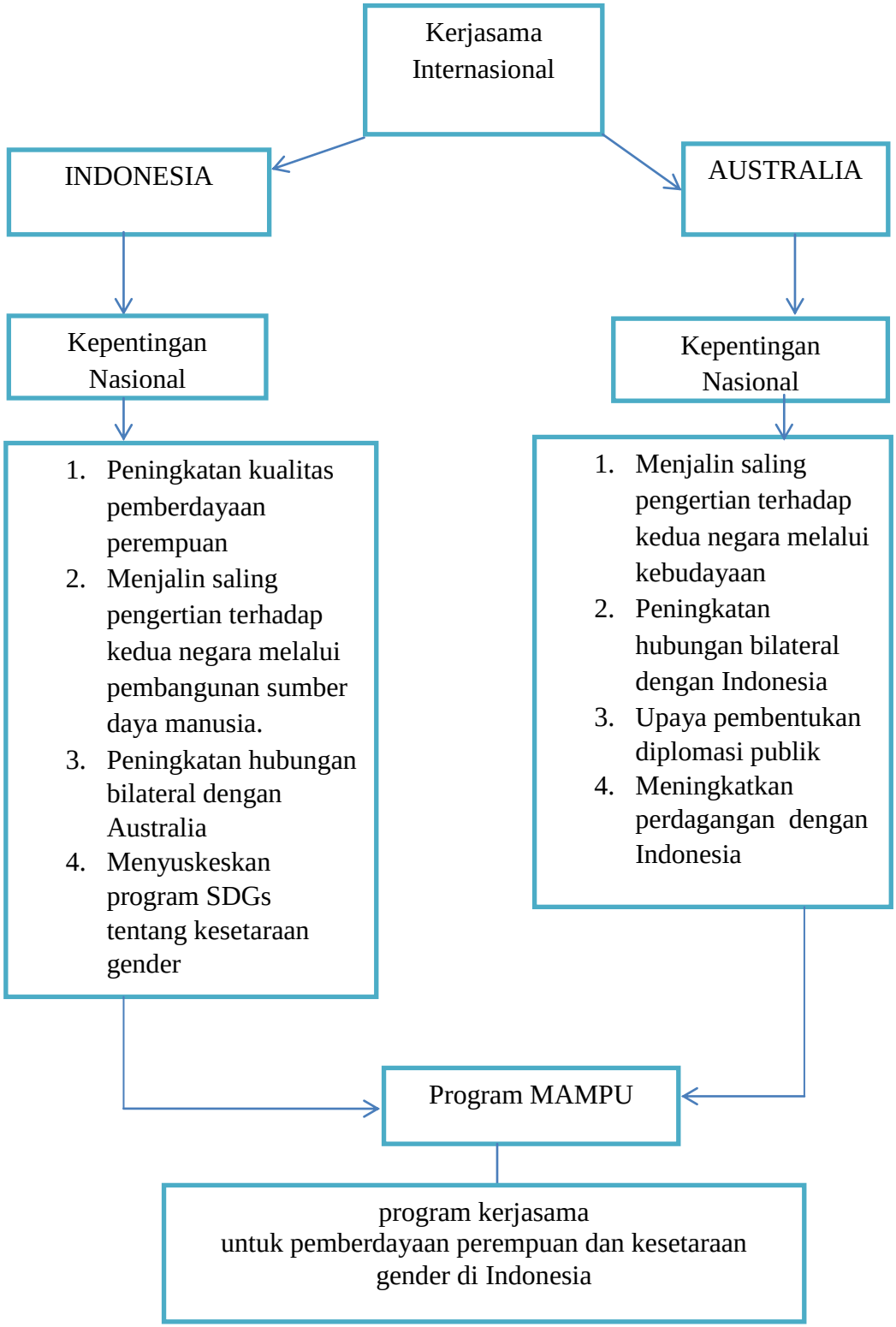
1. Bertujuan untuk melakukan perubahan yang meluas.
2. Menerapkan pendekatan *multi-stakeholder.*
3. Menjembatani kesenjangan di tingkat nasional dan lokal.
4. Didukung dengan bukti/ data.
5. Keberlanjutan.
6. Akuntabilitas.
7. Membangun atas dasar kekuatan organisasi mitra.

Keberhasilan MAMPU akan dinilai dengan mengukur sejauh mana program ini dapat memperluas akses layanan publik dan membawa perbaikan penghidupan dan kesejahteraan bagi perempuan miskin di Indonesia. Di perkirakan bahwa setelah berlangsung selama delapan tahun dengan berdampak pada kebijakan, peraturan, dan sistem layanan publik, program ini akan memberi

kontribusi positif bagi lebih dari tiga juta perempuan-perempuan miskin di Indonesia (http://www.mampu.or.id/id/node/1 di akses pada tanggal 24 Juli 2017).

Program MAMPU di laksanakan langsung oleh mitra-mitra MAMPU yang terdiri dari konsorsium atau individu organisasi perempuan dan organisasi yang tertarik pada isu gender beserta jaringannya atau mitra-mitranya di wilayah kerja program (http://www.mampu.or.id/en/partner di akses pada tanggal 20 Mei 2017).

Mitra utama MAMPU saat ini adalah Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Institut KAPAL Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Migrant CARE, 'Aisyiyah, PERMAMPU (konsorsium 8 LSM di Sumatera), Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), KOMNAS Perempuan dan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dari delapan mitra yang bergabung dalam proram MAMPU yang didanai oleh *Department Of Foreign Australia Trade* (www.MAMPU.or.id). Adanya organisasi perempuan ini dapat dan mempermudah perempuan dalam melaksanakan serta dapat mengakses tingkat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.



Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran